

BULETIN RINGKAS

STATISTICAL & POLICY BRIEF

Berjuang Bersama Bagi Pembangunan Bangsa yang Berkualitas

SISTEM NERACA NASIONAL, *STUNTING*, DAN BASIS DATA TERPADU

Implementasi Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008 mengusulkan penyusunan berbagai neraca-neraca ekonomi untuk maksud mengukur dan memantau kinerja ekonomi makro suatu negara. BPS patut berbangga karena *United Nations* (UN) telah mengakui buku panduan SNA 2008 berbahasa Indonesia tersebut. Neraca-neraca ekonomi sebagai salah satu sumber untuk penyusunan "Satu Data".

Stunting merupakan salah satu indikator status gizi selain *underweight*, *wasting*, dan *overweight*. Prevalensi *stunting* yang

tinggi dalam jangka panjang akan berdampak rendahnya produktivitas nasional. Intinya bahwa *stunting* memberi efek buruk bagi pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif jangka panjang.

Pembangunan dan pengembangan Basis Data Terpadu (BDT) merupakan kunci untuk menuju pendekatan terpadu dalam menentukan penerima manfaat program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Perlu ada mekanisme pemutakhiran mandiri yang lebih dinamis.

Selamat membaca!

Isu Terkini:

Neraca Ekonomi Nasional: Sebagai Basis 'Satu Data' dan Kemungkinan Proteksinya

Oleh:
Slamet Sutomo

3

Permasalahan dan Strategi Penanganan *Stunting* di Indonesia

Oleh:
Sonny Harry B Harmadi

8

Pentingnya Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan

Oleh:
Sudarno Sumarto

13

Buletin Ringkas
Statistical & Policy Brief

Diterbitkan oleh:
Forum Masyarakat Statistik

Penanggung Jawab:
Prof. Dr. Bustanul Arifin
dan
Anggota FMS

- Lokakarya dan Sosialisasi FMS terkini dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat tgl. 17-18 Mei 2017.
- Pendataan UMK dan UMB SE2016 Lanjutan telah dilaksanakan BPS pada Agustus-September 2017.

Fokus Perhatian Berbagai Info Terkini

BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua perlu semakin berbenah diri sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan ragam data dari pengguna data. Bahkan, terpaan arus "*data revolution*" melalui pertumbuhan dan ketersediaan data baru "*Big Data*" menjadi tantangan tersendiri di era perkembangan teknologi yang serba cepat. Dibutuhkan data yang berkualitas, mudah diakses, akurat, koheren, terbanding, dan terklarifikasi.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien juga menjadi keharusan menuju BPS berkelas dunia. Perubahan lingkungan kelembagaan akhir-akhir ini, terutama Sistem Statistik Nasional yang terpadu dan terintegrasi maka BPS sudah saatnya memperkuat aspek hukum melalui amandemen UU No. 16/1997 tentang Statistik. FMS sudah menginisiasi agar BPS mulai menyusun *academic paper*.

KATA PENGANTAR

(Oleh: Prof. D. S. Priyarsono)

Buletin Ringkas *Statistical & Policy Brief* kali ini menyajikan tiga artikel dan sebuah laporan kegiatan. Artikel pertama tentang berbagai tantangan yang terkait dengan penyusunan sistem neraca nasional (SNN) ditulis oleh Slamet Sutomo. Adapun artikel kedua tentang strategi penanganan stunting disusun oleh Sonny Harry B. Harmadi. Artikel ketiga tentang penanggulangan kemiskinan dikarang oleh Sudarno Sumarto. Ketiga penulis tersebut adalah anggota FMS 2017-2018. Sebagai penutup dilaporkan kegiatan lokakarya FMS yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dengan tema kebijakan pembangunan pusat-daerah.

Pada saat ini BPS tengah menyiapkan SNN yang memuat *full sequence national accounts* sesuai dengan yang disarankan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (*United Nations, 2009*). Dibandingkan dengan neraca-neraca yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS, penyusunan SNN ini menuntut ketersediaan data yang jauh lebih banyak dan lebih terperinci. Dalam sistem yang baru tersebut terdapat berbagai konsep baru (misalnya antara lain tentang jenis-jenis neraca, unit-unit institusi ekonomi, dan klasifikasi kegiatan ekonomi) dengan definisi yang tidak tepat sama dengan yang selama ini digunakan. Namun demikian, SNN ini menjadi sangat ampuh sebagai alat untuk memahami, mengendalikan, dan merencanakan perekonomian nasional. Di lain pihak, dengan SNN ini informasi tentang perekonomian nasional menjadi sedemikian terbuka dan secara bebas terakses oleh publik. Hal ini menimbulkan potensi kerawanan yang perlu diantisipasi. Slamet Sutomo mengulas permasalahan tersebut dan menyarankan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan perstatistikan.

Prevalensi stunting (*stunting*) pada anak-anak di Indonesia masih jauh di atas angka rata-rata internasional. Fakta tersebut menjadi indikator kuat tentang masih banyaknya permasalahan kesehatan anak-anak di Indonesia yang berdampak nyata pula pada kualitas kesehatan masyarakat. Sonny Harry B. Harmadi menilai bahwa berbagai survei yang dilakukan oleh BPS untuk merekam berbagai fenomena yang berkaitan dengan permasalahan stunting tersebut masih perlu diperbaiki agar lebih berdaya guna sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pembangunan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu diusulkan berbagai langkah untuk memperbaiki statistik kesehatan.

Dalam artikel ketiga Sudarno Sumarto memaparkan hasil pengamatannya bahwa berbagai program subsidi langsung ke masyarakat miskin menghadapi masalah salah sasaran, yakni memberikan subsidi kepada orang yang tidak berhak dan tidak memberikan subsidi kepada orang yang berhak. Untuk menjawab persoalan itu Pemerintah membangun Basis Data Terpadu (BDT). Secara umum, BDT merupakan data yang sangat rinci berisikan informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk Indonesia (*by name, by address*) yang paling rendah status kesejahteraannya. Selanjutnya artikel ini mengupas langkah-langkah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan BDT, antara lain melalui mekanisme pemutakhiran mandiri.

Pada tanggal 17-18 Mei 2017 FMS menyelenggarakan lokakarya di Lombok Nusa Tenggara Barat yang bertajuk "Peningkatan Kualitas Data dan Governansi Kebijakan Pembangunan Pusat-Daerah". Dalam kesempatan tersebut kembali ditegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS dalam hal pembangunan perstatistikan dalam rangka mendukung pembangunan Pusat-Daerah. Salah satu langkah konkret untuk mewujudkan sinergi tersebut adalah membentuk Forum Data (wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan BPS) untuk menunjang prakarsa "NTB Satu Data" dan "NTB Satu Peta". Langkah ini sejalan dengan prakarsa nasional, yakni kebijakan "Satu Data" yang perangkat perundang-undangannya tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat.

NERACA EKONOMI NASIONAL: SEBAGAI BASIS ‘SATU DATA’ DAN KEMUNGKINAN PROTEKSINYA

Oleh
Slamet Sutomo¹

Pendahuluan

United Nations (2009) telah menerbitkan suatu buku manual (*a manual book*) terbaru yang disebut sebagai *System of National Accounts (SNA)* atau Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008. SNN 2008 merupakan buku panduan untuk negara-negara di dunia dalam menyusun dan melakukan kompilasi neraca nasional (*national accounts*) suatu negara². Sebagai implikasinya, SNN 2008 mengusulkan penyusunan neraca-neraca ekonomi (*economic accounts*) untuk maksud mengukur dan memantau kinerja ekonomi makro di suatu negara.

Neraca-neraca ekonomi yang diusulkan SNN 2008 merupakan suatu rangkaian neraca ekonomi yang saling terkait (*full sequence of economic accounts*) yang menjelaskan kinerja ekonomimakro suatu negara. Neraca-neraca ekonomi dimulai dari neraca produksi yang menjelaskan besarnya output dan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh unit-unit institusi ekonomi (*economic institutional units*) atau pelaku-pelaku ekonomi. Neraca pendapatan dan pengeluaran yang menjelaskan pendapatan (*income*) yang diperoleh dari hasil produksi dan penggunaan pendapatan untuk memenuhi pengeluaran (*expenditures*). Neraca kapital dan neraca finansial yang menjelaskan tabungan (*savings*) yang dimanfaatkan untuk pembentukan modal (*capital formation*) dan/atau diinvestasikan pada pasar finansial (*financial market*). Dan pada akhirnya neraca akhir tahun (*balance sheet*) yang menjelaskan harta (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) atau hutang-hutang suatu negara yang dihasilkan/ditanggung.

Catatan:

Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menyelesaikan kompilasi/penyusunan neraca-neraca ekonomi yang diusulkan oleh SNN 2008 tersebut.

Tulisan ini selain membahas mengenai neraca-neraca ekonomi tersebut dan juga membahas mengenai kebutuhan berbagai data yang diperlukan, tulisan ini menyarankan agar neraca-neraca ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu basis ‘satu data’ yang sedang digagas oleh pemerintah untuk menjelaskan mengenai kondisi ekonomimakro negara. Pada sisi lain, tulisan ini juga mempertanyakan kemungkinan sistem proteksi yang perlu dilakukan³.

Neraca-Neraca Ekonomi yang Diusulkan SNN 2008

Neraca-neraca ekonomi yang diusulkan oleh SNN 2008 untuk dapat menyajikan gambaran mengenai kondisi ekonomimakro suatu negara adalah sebagai berikut⁴.

¹ Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2017-2018

² SNN 2008 disusun bersama-sama dengan *European Commission, International Monetary Funds (IMF), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *World Bank*.

³ Neraca-neraca ekonomi yang diusulkan oleh SNN 2008 tersebut pada tulisan ini diistilahkan sebagai neraca ekonomi nasional.

⁴ Neraca-neraca ekonomi dijelaskan secara singkat di sini; lebih lengkap lihat *United Nations* (2009).

“Neraca-neraca ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk kepentingan penyusunan ‘satu data’ yang sedang digagas oleh pemerintah. Yang dibutuhkan adalah sosialisasi SNN 2008 kepada stakeholders agar dapat memahami neraca-neraca ekonomi tersebut termasuk konsep dan definisi yang digunakan...”

a. Neraca Produksi

Neraca produksi (*production account*) disusun untuk menggambarkan banyaknya produksi atau besarnya output yang dihasilkan oleh berbagai unit institusi ekonomi di suatu negara. Selain output yang dihasilkan oleh suatu negara, neraca produksi juga menunjukkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh berbagai unit institusi ekonomi yang kemudian menjadi ukuran mengenai besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, dari neraca produksi dapat diketahui peran unit-unit institusi ekonomi (pelaku-pelaku ekonomi) dalam perekonomian suatu negara, misalnya peran rumahtangga, peran pemerintah, peran korporasi bukan-finansial (seperti perusahaan-perusahaan industri manufaktur), peran korporasi finansial (seperti pada kegiatan-kegiatan bursa efek) dalam membangun perekonomian suatu negara.

Neraca Barang dan Jasa

Untuk maksud memperoleh besarnya PDB, selain melakukan penyusunan atau kompilasi neraca produksi, SNN 2008 juga menganjurkan untuk membangun neraca barang dan jasa (*the goods and services account*). Jika neraca produksi merinci output menurut unit institusi ekonomi, neraca barang dan jasa merinci output menurut berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi domestik termasuk juga yang diperoleh dari impor.

Unit-Unit Institusi Ekonomi

Unit-unit institusi ekonomi (pelaku-pelaku ekonomi) menurut SNN 2008 dirinci menjadi 5 (lima) unit institusi ekonomi residen (domestik) dan 1 (satu) unit institusi ekonomi bukan-residen (luar negeri):

- Rumahtangga (*household sector*),
- Lembaga nir-laba yang membantu rumahtangga (*non-profit institutions serving household sector* atau NPISHs),
- Pemerintahan umum (*general government sector*),
- Korporasi bukan-finansial (*non-financial corporation sector*),
- Korporasi finansial (*financial corporation sector*), dan
- Luar negeri (*rest of the world*).

Klasifikasi Kegiatan Ekonomi

Klasifikasi kegiatan ekonomi mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dengan rincian sebagai berikut (terdiri dari kategori/alfabet A sampai dengan U):

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
- B. Pertambangan dan penggalian

- C. Industri pengolahan
- D. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin
- E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- H. Transportasi dan pergudangan
- I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
- J. Informasi dan komunikasi
- K. Jasa keuangan dan asuransi
- L. Real estat
- M. Jasa profesional, ilmiah, dan teknis
- N. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- P. Jasa pendidikan
- Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- R. Kesenian, hiburan, dan rekreasi
- S. Kegiatan jasa lainnya
- T. Jasa perorangan yang melayani rumahtangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumahtangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
- U. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

b. Neraca Distribusi Pendapatan Primer Domestik

Neraca distribusi pendapatan primer domestik (*generation of primary income account*) merinci nilai tambah menurut komponen-komponennya, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, *mixed income*, dan komponen-komponen lainnya seperti pajak-pajak yang dibayar kepada pemerintah dan penyusutan (konsumsi terhadap barang-barang modal atau *consumption of fixed capital* atau *consumption of capital goods*). Jadi, neraca distribusi pendapatan primer domestik merinci PDB menjadi berbagai bentuk pendapatan yang diterima oleh unit-unit institusi ekonomi domestik. Dengan demikian, dari informasi ini dapat diketahui distribusi pendapatan masyarakat yang diperoleh dari PDB, misalnya upah dan gaji yang diterima, termasuk *mixed income*, oleh rumahtangga Indonesia; surplus usaha yang diterima oleh korporasi bukan finansial (seperti perusahaan-perusahaan industri manufaktur); surplus usaha yang diterima oleh korporasi finansial (perusahaan-perusahaan finansial); surplus usaha yang diterima oleh perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN), dan sebagainya.

c. Neraca Alokasi Pendapatan Primer

Sumber pendapatan primer lain yang mungkin diperoleh oleh unit-unit institusi adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan properti (*property income*) baik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri.

Menurut SNN 2008, *property income* dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) *Investment income*, yang terdiri dari:
 - Bunga (*interest*),
 - *Distributed income of corporations*, yang terdiri dari:
 - *Dividen*,
 - *Withdrawals from income of quasy-corporations*,
 - *Reinvested earnings on foreign direct investment*.
- b) *Other investment income*, yang terdiri dari:
 - *Investment income attributable to insurance policy holders*,
 - *Investment income payable on pension entitlements*,
 - *Investment income attributable to collective investment funds shareholders*.

c. Sewa (*rent*)

Neraca alokasi pendapatan primer selain merinci pendapatan primer seperti upah dan gaji, surplus usaha dan mixed income, juga merinci *property income* sebagai sumber pendapatan primer lainnya, baik yang berasal dari dalam negeri (domestik) maupun dari luar negeri. Neraca alokasi pendapatan primer menghasilkan pendapatan nasional bruto (*gross national income* atau GNI) dan pendapatan primer neto/pendapatan nasional neto (*net national income* atau NNI). Sehingga, dari neraca alokasi pendapatan primer dapat diperoleh informasi mengenai *property income* yang diperoleh oleh berbagai unit institusi ekonomi domestik, dan secara total, pendapatan nasional baik bruto maupun neto yang diterima oleh negara.

Catatan:

Pendapatan nasional neto (net national income) sama dengan pendapatan nasional bruto (gross national income) dikurangi dengan konsumsi atas barang-barang modal (consumption on fixed capital atau penyusutan).

d. Neraca Distribusi Pendapatan Sekunder

Neraca distribusi pendapatan sekunder menjelaskan *disposable income* unit-unit institusi ekonomi, yaitu setelah pendapatan primer ditambah/dikurangi dengan

current transfers in cash dan social transfers in kind.

e. Neraca Penggunaan Pendapatan

Neraca penggunaan pendapatan (*the use of income account*) menjelaskan penggunaan *disposable income* oleh unit-unit institusi ekonomi untuk membiayai konsumsi akhir (*final consumption expenditures*). Dari neraca ini diperoleh juga informasi mengenai tabungan (*savings*) masing-masing unit institusi ekonomi. Sehingga, dari neraca penggunaan pendapatan ini dapat diperoleh informasi mengenai pola konsumsi (pengeluaran) unit-unit institusi ekonomi domestik dan tabungan yang tersisa, misalnya tabungan rumahtangga, tabungan pemerintah, tabungan korporasi bukan-finansial, tabungan korporasi finansial. Informasi seperti ini sangat bermanfaat untuk mengetahui ceruk pasar yang perlu dimasuki oleh suatu produk-produk tertentu, dan juga untuk memahami daya beli masyarakat.

Catatan:

Pada tabel penyediaan dan penggunaan (supply and use table) untuk melakukan rekonsiliasi mengenai PDB yang diusulkan oleh SNN 2008, pengeluaran unit-unit institusi ekonomi dirinci menurut jenis-jenis komoditas mengikuti Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010.

f. Neraca Kapital

Neraca kapital (*capital account*) mencatat penggunaan tabungan (*savings*) untuk membiayai harta-harta non-finansial (*non-financial assets*) atau yang biasa disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto (*gross fixed capital formation*); dan juga untuk melakukan *capital transfers* yang dilakukan oleh unit-unit institusi ekonomi. Dari neraca kapital diperoleh informasi mengenai *net lending* atau *net borrowing* masing-masing unit institusi ekonomi, yaitu selisih tabungan dengan harta-harta finansial yang dibiayai termasuk melakukan transfer kapital. Jika selisih tersebut positif (*net lending*) artinya suatu unit institusi ekonomi masih memiliki sejumlah dana yang dipinjamkan; dan jika selisih tersebut negatif (*net borrowing*) artinya suatu unit institusi ekonomi tidak mempunyai tabungan, dan justru melakukan kegiatan meminjam sejumlah dana kepada unit institusi ekonomi lainnya.

g. Neraca Finansial

Neraca finansial (*financial account*) secara prinsip merupakan neraca terakhir dari *full sequence* neraca-neraca ekonomi yang diusulkan oleh SNN 2008. Neraca finansial mencatat berbagai transaksi finansial (*financial transactions*) yang dilakukan oleh unit-unit institusi ekonomi domestik dari tabungan (apakah bersifat *net lending* atau *net borrowing*), misalnya apakah melakukan

pinjaman dan sejenisnya yang menyebabkan perubahan dalam kewajiban (*liabilities*) finansial, atau melakukan kegiatan meminjam (*to borrow*) seperti mengambil sejumlah uang dari tabungan, menjual surat-surat berharga, dan sebagainya sehingga memengaruhi besarnya harta (*assets*) finansial.

Catatan 1:

Walaupun setelah ini terdapat beberapa neraca lagi, seperti neraca perubahan dalam harta dan kewajiban, neraca revaluasi, dan neraca akhir tahun (balance sheet). Neraca-neraca perubahan dalam harta dan kewajiban, neraca revaluasi, neraca akhir tahun tidak berhubungan dengan masalah-masalah produksi, konsumsi, pendapatan, dan tabungan, tetapi lebih berhubungan dengan masalah-masalah perubahan penilaian yang terjadi atau penyesuaian terhadap harta dan kewajiban sebelum sampai kepada penghitungan neraca akhir tahun (balance sheet). Perubahan-perubahan yang diperhitungkan, misalnya, adalah yang disebabkan karena gempa bumi, perubahan nilai harta yang disebabkan karena kenaikan harga, dan sebagainya.

Catatan 2:

Pada waktu menyusun Financial Social Accounting Matrix (FSAM) 2005 (yang menggabungkan neraca sektor ril dengan neraca sektor finansial), kerjasama Bank Indonesia dengan BPS, salah satu hasil yang diperoleh adalah bahwa pada tahun tersebut Indonesia ternyata surplus likuiditas tetapi surplus tersebut tidak dapat diserap masyarakat karena tingkat bunga yang tinggi.

h. Neraca Perubahan dalam Harta dan Kewajiban

Neraca perubahan dalam harta dan kewajiban mencatat pengaruh dari berbagai kejadian khusus dan revaluasi penilaian yang menyebabkan perubahan terhadap harta dan kewajiban. Contoh-contoh pengaruh kejadian khusus adalah peperangan dan gempa bumi; contoh revaluasi penilaian adalah kenaikan harga.

i. Neraca Revaluasi

Neraca revaluasi mencatat mengenai perubahan dalam harta (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) sebagai akibat dari adanya revaluasi atau perubahan penilaian terhadap harta dan kewajiban (*holding gains or losses*) sejak awal periode pencatatan saat masuk dan saat keluar atau pada akhir periode pencatatan. Neraca ini mencatat perubahan dalam harta dan kewajiban yang disebabkan oleh penyesuaian-penyesuaian tersebut.

j. Neraca Akhir Tahun

Neraca akhir tahun (*balance sheet*) menjelaskan nilai

(stok) harta dan kewajiban yang dikuasai oleh unit-unit institusi ekonomi pada periode awal dan akhir tahun. Informasi mengenai harta dan kewajiban memberikan petunjuk mengenai 'wealth' suatu negara.

Kebutuhan dan Keterbatasan Data

Karena neraca-neraca ekonomi yang diusulkan sedemikian rinci, kebutuhan terhadap data menjadi sangat banyak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unit institusi ekonomi (pelaku-pelaku ekonomi) dirinci menjadi 5 (lima) unit institusi ekonomi residen (domestik) dan 1 (satu) unit institusi ekonomi bukan-residen (luar negeri), yaitu rumahtangga, lembaga nirlaba yang membantu rumahtangga (*non-profit institutions serving household sector*), pemerintahan umum, korporasi bukan-finansial (*non-financial corporation sector*), korporasi finansial (*financial corporation sector*), dan luar negeri (*rest of the world*). Dengan demikian, data yang dibutuhkan juga sangat bervariasi menurut ke 5 unit institusi ekonomi domestik. Data yang dibutuhkan, misalnya, data mengenai output, data mengenai pendapatan, data mengenai property income, data mengenai pengeluaran, data mengenai investasi fisik, data mengenai transaksi finansial (*financial transaction*), data mengenai harta (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*), dan sebagainya dimana semua data perlu dirinci menurut kelima unit institusi ekonomi.

Pada sisi yang lain, klasifikasi kegiatan ekonomi juga dibuat lebih rinci mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009, dengan rincian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (terdiri dari kategori/alfabet A sampai dengan U). Dan juga, rincian komoditas dibutuhkan secara rinci menurut Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010, juga semua klasifikasi ini perlu dibedakan menurut kelima unit institusi ekonomi.

Untuk data rumahtangga, data yang digunakan dapat diperoleh dari hasil survei semacam Susenas dan sejenisnya, tetapi data dari sumber survei seperti itu masih membutuhkan banyak penyesuaian terhadap jenis-jenis data yang dibutuhkan untuk menyusun neraca-neraca ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan data mengenai pendapatan, data mengenai *property income*, data mengenai investasi dan data transaksi finansial (*financial transaction*), data mengenai harta dan kewajiban rumahtangga, yang biasanya jarang ditanyakan pada Susenas.

Data mengenai kegiatan lembaga nirlaba juga masih sangat terbatas. Dibutuhkan semacam survei untuk menghasilkan data yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga nirlaba.

Data pemerintahan umum juga masih terbatas. Data administrasi pemerintahan dapat digunakan tetapi perlu melakukan berbagai penyesuaian terhadap konsep dan definisi yang digunakan.

Data mengenai kinerja perusahaan-perusahaan swasta, yang berupa laporan keuangan akhir tahun, serta data mengenai kinerja perusahaan-perusahaan pemerintahan (BUMN) dibutuhkan untuk membantu penyusunan *full sequences of economic accounts*; termasuk juga data mengenai berbagai transaksi finansial yang direkam oleh korporasi finansial pada pasar finansial (*stock exchange*).

Selain itu masih dirasakan adanya kebutuhan untuk menyamakan konsep dan definisi yang digunakan oleh SNN 2008 versus berbagai data dari kementerian/ lembaga pemerintah dan juga oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya, konsep output pada perdagangan yang dicatat adalah margin perdagangan, bukan omzetnya atau *sales*-nya; pencatatan impor perlu dilakukan dengan menggunakan konsep *accrual basis* (kapan dikirim), bukan *cash basis* (kapan dibayar); belum lagi mengenai perbedaan isi dokumen impor dengan realita impor; konsep investasi versus konsep pembentukan modal; konsep pengeluaran konsumsi pemerintah versus konsep pengeluaran konsumsi individu dan pengeluaran konsumsi kolektif, dan sebagainya.

Semua konsep dan definisi dan tata cara menyusun neraca-neraca ekonomi diatur dalam SNN 2008; yang diperlukan adalah suatu sosialisasi kepada semua *stakeholders* mengenai SNN 2008.

Neraca-Neraca Ekonomi sebagai Basis 'Satu Data' yang Perlu Diproteksi

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sedemikian luasnya informasi yang disajikan oleh neraca-neraca ekonomi yang diusulkan oleh SNN 2008, dimana neraca-neraca ekonomi tersebut secara jelas menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara (misalnya Indonesia) dari proses produksi sampai kepada harta dan kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) yang dihasilkan/ditanggung. Informasi ini secara jelas menggambarkan ketahanan ekonomi suatu negara (misalnya Indonesia).

Pada satu sisi, informasi tersebut secara positif sangat bermanfaat bagi suatu negara sebagai basis 'satu data' dalam upaya merencanakan perkembangan ekonomimakro pada masa-masa yang akan datang, apalagi jika informasi neraca-neraca ekonomi tersebut dilengkapi dengan informasi tambahan lain secara lebih rinci. Akan tetapi pada sisi lain, jika informasi tersebut diterima secara sangat terbuka oleh pihak-pihak lain

dimana informasi tersebut menunjukkan 'jeroan' suatu negara, bisa jadi pihak-pihak tertentu tersebut dapat memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Dengan demikian, data sedemikian perlu dilindungi/ diproteksi terhadap kepentingan sementara pihak yang ingin menggunakan data mengenai ketahanan ekonomi negara tersebut dari maksud-maksud tindakan yang merugikan negara.

Catatan:

Sebelum terjadi krisis ekonomi/moneter pada tahun 1997/1998, kondisi ekonomimakro Indonesia adem-ayem saja, tidak menunjukkan permasalahan yang serius; tetapi secara tiba-tiba dan secara cepat krisis moneter/ekonomi melanda Indonesia yang dimulai dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US\$.

Kesimpulan

SNN 2008 mengusulkan penyusunan neraca-neraca ekonomi untuk menjelaskan kinerja ekonomimakro suatu negara. Untuk dapat menyusun neraca-neraca ekonomi tersebut dibutuhkan berbagai jenis data yang bersumber dari unit-unit institusi ekonomi domestik dan data lainnya yang terkait. SNN 2008 juga menjelaskan konsep dan definisi yang harus digunakan dalam melakukan penyusunan dan kompilasi neraca-neraca ekonomi tersebut.

Neraca-neraca ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk kepentingan penyusunan 'satu data' yang sedang digagas oleh pemerintah. Yang dibutuhkan adalah sosialisasi SNN 2008 kepada *stakeholders* agar dapat memahami neraca-neraca ekonomi tersebut termasuk konsep dan definisi yang digunakan.

Pada sisi lain, karena neraca-neraca ekonomi tersebut menggambarkan kondisi ekonomimakro suatu negara secara jelas, dibutuhkan suatu sistem proteksi agar informasi mengenai ketahanan ekonomi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang merugikan negara.

Daftar Pustaka

United Nations (2009). *System of National Accounts 2008*. New York.

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENANGANAN STANTING DI INDONESIA

Oleh
Sonny Harry B. Harmadi¹

Pendahuluan

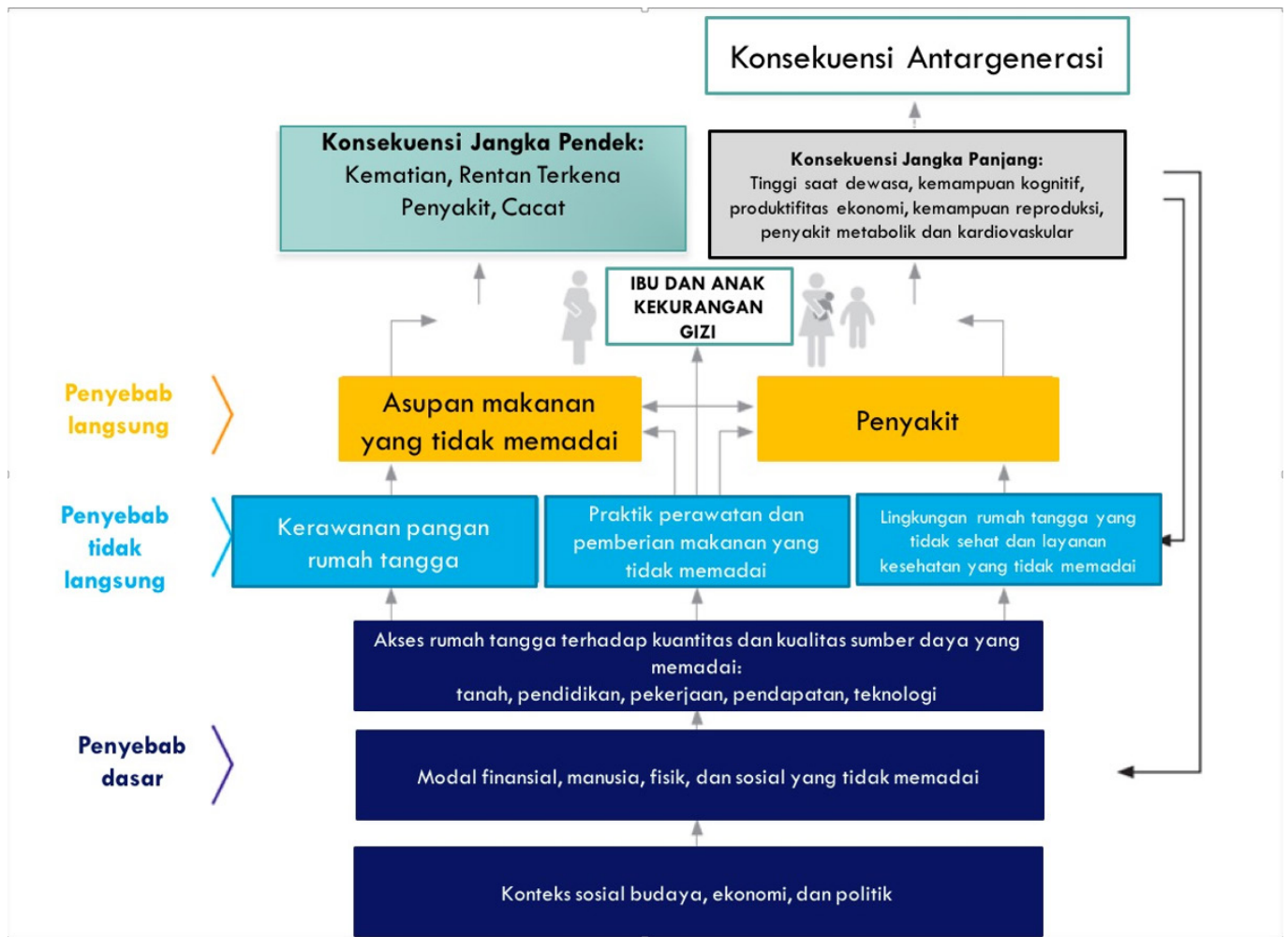
Stunting (*stunting*) telah menjadi masalah global dalam perspektif pembangunan manusia. Di tahun 2010 sekitar 171 juta anak (26,7%) mengalami *stunting*, dimana 167 juta anak diantaranya berasal dari negara berkembang (Onis, Blössner, Borghi, 2012). Selama 27 tahun terakhir telah terjadi penurunan prevalensi *stunting* dunia, dari 39,5% di tahun 1990 menjadi 22,5% di tahun 2016. Namun *Global Nutrition Report* (2016) menjelaskan bahwa masih terdapat 34 negara yang mengalami masalah *stunting* serius dan menjadi penyumbang 90% masalah gizi global, termasuk diantaranya Indonesia. Bahkan prevalensi *stunting* di Indonesia menurut data 2013 masih jauh di atas prevalensi *stunting* global. Tidak mengherankan pemerintah Indonesia saat ini memberikan prioritas percepatan penurunan *stunting* melalui berbagai program kebijakan terpadu.

Dalam kesehatan, *stunting* merupakan salah satu indikator status gizi selain *underweight*, *wasting* dan *overweight*. Pengukuran ini biasanya dilakukan pada anak balita (bawah lima tahun). *Stunting* mengacu pada ukuran tinggi badan terhadap umur anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak seumurnya, berdasarkan standar Z-score Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*). Indikator *underweight* merupakan indikator yang mencerminkan anak dengan berat badan kurang dibanding rata-rata berat badan anak seumurnya, mencerminkan kondisi kurang gizi akut. *Wasting* menggambarkan anak kurus yang diukur dari perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan, juga mencerminkan kurang gizi akut. Sedangkan *overweight* merupakan kebalikan dari *underweight* dimana berat tubuh seorang balita melampaui standar *WHO*.

Penelitian *WHO* menunjukkan bahwa seorang balita yang mengalami kurang berat badan (*underweight*) akan menghadapi risiko kematian yang lebih besar dibanding balita normal. Semakin jauh dari berat badan normal, semakin besar risiko kematiannya. Sedangkan seorang balita yang mengalami hambatan pertumbuhan tinggi badan (*stunting*) umumnya karena kurang gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi sebagai akibat kualitas asupan pangan yang buruk atau infeksi berulang. Di Indonesia cukup banyak balita mengalami infeksi berulang pada pencernaan dan saluran pernafasan (ISPA) yang mengakibatkan anak mengalami gangguan nutrisi. Penderita *stunting* akan mengalami masalah dalam jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan mental, prestasi sekolah yang buruk, dan tidak mampu mencapai kapasitas pertumbuhan otak yang optimal. Prevalensi *stunting* yang tinggi dalam jangka panjang akan berdampak terhadap rendahnya produktivitas nasional. Perempuan bertubuh pendek akan menghadapi risiko komplikasi yang tinggi selama masa kehamilan dan persalinan. Bayi yang dilahirkan juga berisiko lahir dengan berat badan kurang dan menciptakan masalah *stunting*

¹ Anggota Forum Masyarakat Statistik/Staf Ahli Menko PMK Bidang Kependudukan

Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak seumurnya, berdasarkan standar Z-score WHO. Intinya bahwa *stunting* memberi efek buruk bagi pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif jangka panjang.



Gambar 1. Model Kausalitas UNICEF
 Sumber: UNICEF, 2013

antar generasi. Intinya bahwa stunting memberi efek buruk bagi pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif jangka panjang.

Menurut *UNICEF*, *stunting* adalah salah satu bentuk kegagalan pertumbuhan. Seorang anak yang *stunted* sering kali memiliki proporsi tubuh yang terlihat normal, namun dengan tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata untuk umurnya. Gangguan pertumbuhan pada masa awal kehidupan (terutama 1000 hari pertama kehidupan sejak pembuahan hingga berumur 2 tahun) menjadi indikasi *stunting* dan secara berkepanjangan merugikan fungsi tumbuh kembang anak. *Wasting* atau anak balita kurus (tidak proporsional antara berat badan dengan tinggi badan) mencerminkan masalah kekurangan gizi yang terjadi akibat kurangnya nutrisi dan sering mengalami penyakit infeksi terutama infeksi pencernaan dengan gejala muntah dan diare. *Wasting* akan mengganggu sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan balita rentan terkena penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan *overweight* atau balita yang mengalami obesitas cenderung memiliki

probabilitas yang besar untuk mengalami obesitas di masa dewasa. Akibatnya balita *overweight* ketika dewasa berisiko tinggi mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kardiovaskular, dan kanker.

Status gizi balita berdasarkan standar *WHO* menggunakan ukuran sebagai berikut:

- *Underweight*: berat badan menurut umur < -2 standar deviasi (SD) dari *WHO Child Growth Standards median*
- *Stunting*: tinggi badan menurut umur < -2 SD dari *WHO Child Growth Standards median*
- *Wasting*: berat badan terhadap tinggi badan < -2 SD dari *WHO Child Growth Standards median*
- *Overweight*: berat badan terhadap tinggi badan > +2 SD dari *WHO Child Growth Standards median*

Standar di atas disusun berdasarkan *Multicentre Growth Reference Study (MGRS)* yang dilakukan oleh *WHO*. Pada tahun 1993 *WHO* meninjau ulang referensi pengukuran

antropometri yang ada dan memutuskan untuk melaksanakan *MGRS* sejak tahun 1997 hingga 2003. Tujuannya untuk memperbaharui standar pengukuran status gizi anak. Studi tersebut melibatkan lebih dari 8 ribu responden bayi dan anak yang lahir dan berkembang dalam lingkungan serta asupan yang memungkinkannya untuk tumbuh secara optimal. Studi mencakup beragam etnis dan budaya yang tersebar di Brazil, Ghana, India, Norwegia, Oman dan Amerika Serikat.

Tabel 1. Tingkat Masalah Status Gizi Menurut Prevalensi Kasus

Underweight	< 10%: prevalensi rendah 10-19%: prevalensi sedang 20-29%: prevalensi tinggi ≥ 30%: prevalensi sangat tinggi
Stunting	< 20%: prevalensi rendah 20-29%: prevalensi sedang 30-39%: prevalensi tinggi ≥ 40%: prevalensi sangat tinggi
Wasting	< 5%: normal 5-9%: buruk 10-14%: masalah serius ≥ 15%: masalah kritikal

Sumber: WHO, 1995

Perkembangan *Stunting* di Indonesia

Berdasarkan laporan yang ditulis Bank Dunia bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dijelaskan bahwa permasalahan *stunting* di Indonesia tersebar luas secara geografis, dengan tren justru sedikit meningkat selama beberapa tahun terakhir. Menurut data riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* balita di Indonesia naik dari 36,8% di tahun 2007 menjadi 37,2% di tahun 2013. Padahal menurut Bank Dunia, pada periode yang sama terjadi penurunan kemiskinan di Indonesia, dari 16,6% menjadi 11,4%, sehingga penurunan kemiskinan dianggap tidak berdampak langsung terhadap prevalensi *stunting*. Jika merujuk pada Tabel 1 di atas, Indonesia termasuk kategori negara dengan prevalensi *stunting* tinggi dan membutuhkan strategi yang tepat dalam menurunkan kasus *stunting* secara cepat.

Kenaikan prevalensi *stunting* selama periode 2007-2013 tidak sejalan dengan perbaikan beberapa indikator kesehatan lainnya. Sebagai contoh, data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi ibu yang mencuci tangan naik drastis dari 38% di tahun 2007 menjadi 67% di

tahun 2013. Pada periode tersebut, jumlah balita yang menerima imunisasi juga meningkat signifikan dari 25% menjadi 62%. Balita dengan akses terhadap sanitasi yang layak juga naik dari 53% menjadi 60%. Demikian halnya balita yang memperoleh ASI eksklusif meningkat dari 44% menjadi 64%. Jika diperbandingkan data antara pedesaan dan perkotaan nampak bahwa di daerah perkotaan angkanya cenderung lebih baik dibanding pedesaan untuk sebagian besar indikator kesehatan tersebut.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah mengajukan penajaman sasaran di 50 wilayah kabupaten/kota dengan prevalensi *stunting* tertinggi. Data Kemenkes tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten dengan prevalensi *stunting* balita tertinggi di Indonesia, mencapai angka 70,43%. Sedangkan di Pulau Jawa, Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat) menjadi 2 kabupaten yang memiliki prevalensi *stunting* balita tertinggi dengan angka masing-masing sebesar 54,97% dan 52,55%.

Sedangkan dari sisi jumlah, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung memiliki jumlah balita *stunting* terbanyak di Indonesia. Padahal kedua kabupaten tersebut relatif dekat dengan Jakarta. Perbandingan data Riskesdas 2007 dan 2013 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* pada rumah tangga termiskin naik dari 43% menjadi 49%. Sedangkan bagi rumah tangga yang lebih sejahtera, prevalensinya cenderung turun. Dampaknya, kesenjangan prevalensi *stunting* antara rumah tangga termiskin dan yang lebih sejahtera semakin besar.

Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* di Indonesia diantaranya: (1) kondisi kesehatan dan status gizi ibu hamil dan menyusui yang buruk, (2) bayi tidak memperoleh asupan ASI dan pangan bergizi yang memadai, (3) adanya infeksi berat dan berulang pada balita sebagai akibat kondisi lingkungan dan sanitasi yang buruk serta kesulitan memperoleh air bersih. Ketidackucupan nutrisi hanyalah salah satu dari begitu banyak penyebab *stunting*. Seorang balita yang mengalami sakit akibat infeksi akan sulit menerima asupan pangan bergizi secara normal. Meskipun dalam jumlah yang tidak banyak, *stunting* juga dapat disebabkan karena adanya tekanan psikologi yang dialami oleh ibu hamil dan balita. Selain itu, prevalensi *stunting* pada anak di bawah dua tahun (baduta) umumnya didominasi oleh faktor berat badan lahir yang kurang akibat kekurangan nutrisi yang dialami ibu saat hamil dan melahirkan, maupun karena ibu yang juga mengalami *stunting* ketika masa kanak-kanak.

Bank Dunia berargumen bahwa menekan prevalensi *stunting* dapat berpengaruh positif terhadap 4 hal. Pertama, tingkat pendidikan anak akan lebih tinggi,

didukung oleh kemampuan kognitif dan motorik yang lebih baik. Kedua, mencegah seorang anak mengalami *stunting* akan berpengaruh dalam jangka panjang, dimana produktivitas akan lebih tinggi dan tercermin dari tingkat upah yang lebih tinggi pula. Ketiga, anak yang terhindar dari *stunting* cenderung tidak miskin ketika dewasa. Keempat, penurunan prevalensi *stunting* menyebabkan produktivitas nasional yang lebih tinggi, memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Mencermati dampak negatif yang ditimbulkan dari tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia, pemerintah telah menyusun dan melakukan berbagai langkah kebijakan melalui intervensi yang dibutuhkan dan bersifat multisektoral. Kerangka penanganan *stunting* di Indonesia selain intervensi yang bersifat umum juga termasuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik mencakup sasaran ibu hamil, ibu menyusui dengan anak usia 0-6 bulan, ibu menyusui dengan anak usia 7 hingga 23 bulan. Tujuannya untuk mengintervensi secara spesifik kelompok yang masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan intervensi gizi sensitif mencakup perbaikan kondisi lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih untuk mengurangi risiko penyakit infeksi. Selain itu dalam intervensi gizi sensitif juga melibatkan beberapa kegiatan seperti fortifikasi pangan untuk perbaikan asupan gizi, edukasi tentang gizi, pendidikan anak usia dini, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan KB. Mengingat masalah *stunting* bukan hanya menyangkut aspek kesehatan saja, maka penanganan *stunting* di Indonesia bersifat lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, melibatkan diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, BKKBN, Badan POM dan sebagainya.

Rekomendasi untuk Pengumpulan Data *Stunting*

Setiap kebijakan tentu membutuhkan basis data yang akurat. Saat ini, data *stunting* di Indonesia hanya bersumber dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dikumpulkan setiap 3 tahun sekali (di masa lalu) dan 5 tahun sekali (di masa mendatang). BPS bersama Kemenkes rencananya akan mengintegrasikan pelaksanaan Susenas dan Riskesdas 2018. Keduanya mewawancarai responden yang sama, namun dilakukan dalam waktu berbeda, dimana Susenas pada Maret 2018 dan Riskesdas pada April 2018. Adanya perbedaan waktu pelaksanaan didasarkan atas pertimbangan waktu pelaksanaan wawancara Susenas yang cukup lama dan pengukuran antropometri Riskesdas yang juga butuh waktu dan keahlian khusus. Tentu integrasi pelaksanaan Susenas (BPS) dan Riskesdas (Kemenkes) merupakan langkah maju

yang perlu diapresiasi. *Stunting* erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi rumah tangga. Oleh karenanya, integrasi data Susenas dengan Riskesdas sangat penting. Kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab *stunting* secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Dengan mengintegrasikan data Susenas dan Riskesdas, kita bisa mengetahui secara lebih baik kondisi yang ada, misalnya, prevalensi *stunting* pada 10% rumah tangga dengan pendapatan/pengeluaran terendah. Lalu juga faktor-faktor yang menyebabkan *stunting* pada rumah tangga miskin, dan sebagainya. Jika kita mengetahui secara spesifik karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang memiliki balita *stunting*, maka kita dapat mendesain program-program yang lebih spesifik dan lebih efektif. Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai contoh, dapat didesain dengan menetapkan *conditional* atau tambahan prasyarat tertentu bagi keluarga yang memiliki balita. Tujuannya jelas untuk menekan prevalensi *stunting* pada kelompok keluarga miskin yang memiliki balita. Dengan adanya integrasi pelaksanaan Susenas dan Riskesdas 2018, para pengambil kebijakan dapat memanfaatkan data tren dan distribusi *stunting* menurut kelompok pengeluaran dan kelompok sosial-ekonomi. Distribusi *stunting* menurut wilayah juga penting diketahui mengingat pemerintah daerah memiliki peran strategis bagi penurunan prevalensi *stunting*.

Pada pengumpulan data Riskesdas 2013 lalu diketahui bahwa tidak seluruh responden memperoleh pengukuran tinggi dan berat badan. Beberapa petugas lapangan hanya melakukan pencatatan berdasarkan data KMS (kartu menuju sehat). Hal ini menurunkan akurasi data untuk mengukur status gizi balita pada umur tertentu, khususnya *stunting*. Dalam pelaksanaan Riskesdas 2018 hendaknya seluruh petugas lapangan melakukan pengukuran antropometri secara langsung (mengumpulkan data primer). Sehingga diperoleh akurasi data yang lebih baik.

Di Amerika Serikat, sumber utama data antropometri anak berasal dari data *National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES)* dan *the Centers for Disease Control and Prevention's Pediatric Nutrition Surveillance System (PedNSS)*. Kedua sumber data tersebut tidak mencakup *homeless children*. Dampaknya, para pakar menganggap bahwa prevalensi *stunting* di AS lebih rendah dari kenyataannya. Belajar dari pengalaman AS, Indonesia perlu mempertimbangkan pengumpulan data antropometri bagi anak-anak yang tinggal di luar keluarga (rumah tangga biasa). Seperti anak-anak yang tinggal di panti asuhan, pesantren, dan sebagainya. Oleh karenanya, integrasi pelaksanaan Susenas dan Riskesdas 2018 sebaiknya dapat menjangkau "rumah tangga khusus". Sebagai satu-satunya sumber data *stunting* yang

akan dikumpulkan dan dipublikasikan setiap 5 tahun sekali, Riskesdas perlu menyempurnakan metode pengumpulan datanya. Demikian halnya dengan Susenas Maret 2018 yang akan menggunakan responden survei yang sama. Selama ini Susenas hanya dirancang untuk rumah tangga biasa.

Mengacu pada berbagai hasil penelitian dan literatur, diketahui bahwa infeksi berulang (*recurrent infection*) seperti pneumonia, TB, ISPA, dan diare menjadi salah satu penyebab *stunting*. Namun dalam Riskesdas tidak ada pertanyaan yang dapat menangkap informasi tentang infeksi berulang. Oleh karenanya, BPS bersama Kemenkes perlu mempertimbangkan untuk memasukkan pertanyaan yang dapat menangkap informasi tersebut di dalam kuesioner Riskesdas 2018.

Pertanyaan dalam kuesioner Riskesdas ada baiknya dapat mengidentifikasi beberapa program pemerintah, khususnya yang terkait langsung intervensi peningkatan status gizi balita dan ibu hamil. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan *stunting*, peningkatan status gizi balita dan ibu hamil. Data Riskesdas yang lengkap akan sangat bermanfaat jika dapat diakses oleh para peneliti dan analis kebijakan. Selama ini beberapa peneliti mengalami kesulitan untuk mengakses data mentah Riskesdas secara lengkap. Kita juga perlu memperhatikan regularitas data status gizi balita. Para pengambil kebijakan akan mengalami kendala ketersediaan data mengingat Riskesdas dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan setidaknya setiap 2 tahun sekali dilaksanakan “Susenas Plus” bekerjasama dengan Kemenkes melakukan minisurvei pengukuran antropometri terhadap sub sampel Susenas. Meskipun tidak representatif untuk tingkat kabupaten/kota, namun bisa diupayakan agar menghasilkan data yang representatif di tingkat provinsi. Tujuannya agar *stunting* dapat dimonitor lebih reguler dan terintegrasi dengan data kesejahteraan yang dihasilkan oleh Susenas.

Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI (2017). *Operationalizing A Multi-Sectoral Approach for the Reduction of Stunting in Indonesia*. DKI Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

de Onis, M., Blössner, M. and Borghi, E. (2011). Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990–2020. *Public Health Nutrition*, 15(01), pp.142-148.

Hizli, S., Abaci, A., Büyükgebiz, B. and Büyükgebiz, A., 2007. Nutritional stunting. *Pediatric endocrinology reviews: PER*, 4(3), pp.186-195.

Hoddinott, J., Maluccio, J., Behrman, J., Flores, R. and Martorell, R. (2008). Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults. *The Lancet*, 371(9610), pp.411-416.

Lewit, E. and Kerrebrock, N. (1997). Population-Based Growth Stunting. *The Future of Children*, 7(2), p.149.

Martorell, R. and Young, M. (2012). Patterns of Stunting and Wasting: Potential Explanatory Factors. *Advances in Nutrition: An International Review Journal*, 3(2), pp.227-233.

Onis, M. (2006). *WHO child growth standards*. Geneva: World Health Organization, Department of Nutrition for Health and Development.

Unicef.in. (2017). *Stunting | UNICEF*. [online] Available at: <http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting> [Accessed 1 Sep. 2017].

Unicef.org. (2017). *UNICEF - Progress for Children 2007 - Stunting, wasting and overweight*. [online] Available at: https://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41505.htm [Accessed 4 Sep. 2017].

Who.int. (2017). *WHO | Description*. [online] Available at: <http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html> [Accessed 3 Sep. 2017].

World Health Organization, 2010. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide. *Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide*.

World Health Organization. (2017). *Stunting in a nutshell*. [online] Available at: http://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/ [Accessed 2 Sep. 2017].

PENTINGNYA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

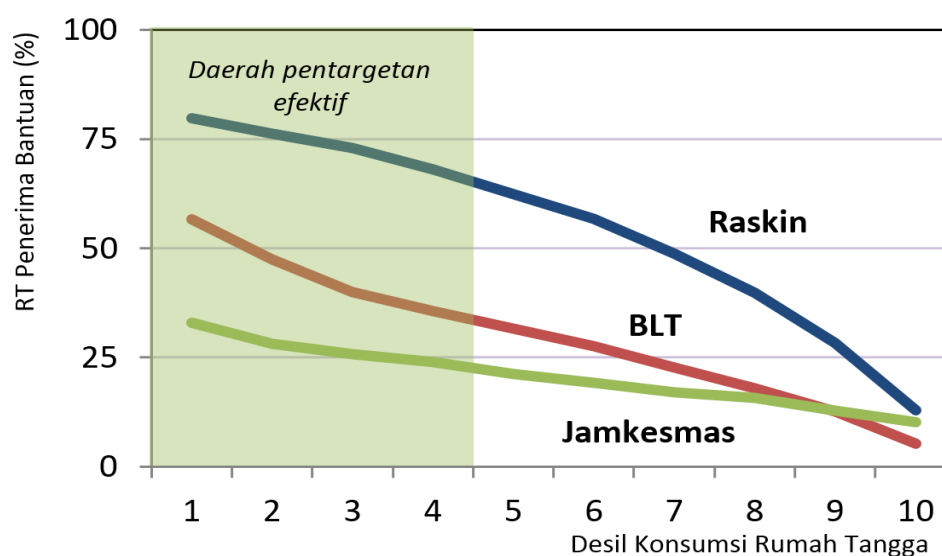
Oleh
Sudarno Sumarto¹

Pentingnya Penargetan

Indonesia menghadapi dua episode krisis beruntun, yaitu krisis ekonomi Asia (1998) dan krisis keuangan global (2008). Krisis berdampak pada seluruh strata sosial, walaupun dengan intensitas yang tidak sama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa krisis berdampak negatif terhadap kelompok yang berpendapatan paling tinggi (Frankenberg *et al.*, 1999), sementara pendapat lain mengatakan bahwa golongan berpendapatan paling rendah merupakan kelompok yang paling rentan selama periode krisis (Levinsohn *et al.*, 1999). Adanya krisis juga memengaruhi orang miskin dan nonmiskin yang rentan (*vulnerable*) melalui penurunan tingkat upah riil dan peningkatan harga komoditas pokok yang sangat drastis (Manning, 2000). Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, dibutuhkan kebijakan intervensi khusus langsung ke rumah tangga yang dilakukan tepat sasaran serta diarahkan (diberikan) kepada kelompok masyarakat yang miskin dan rentan (Brunori dan O'Reilly, 2010).

Sejak 1998, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin: Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) yang bertransformasi menjadi Beras Masyarakat Sejahtera (Rastra) pada 2016, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bertransformasi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertransformasi menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada 2013, dan lain-lain. Namun, berdasarkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, hanya sekitar 30% penduduk miskin yang sekaligus menerima ketiga program tersebut (Raskin, BLT, dan Jamkesmas). Hal ini menunjukkan bahwa sistem penargetan program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan masih kurang efektif—tingkat *inclusion error* dan *exclusion error* masih cukup tinggi.

Pembangunan BDT merupakan jawaban pemerintah atas tantangan untuk memperbaiki sistem penetapan sasaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sistem penargetan program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan masih kurang efektif—tingkat *inclusion error* dan *exclusion error* masih cukup tinggi.



Gambar 1. Efektivitas penargetan beberapa program bantuan sosial, 2009
Sumber: BPS, Susenas 2009 (perhitungan World Bank, 2012)

¹ Penulis berterima kasih kepada G. Irwan Suyanto dan Priadi Asmanto yang telah membantu menyiapkan artikel ini. Tanggung jawab atas kesalahan pada artikel ini tetap menjadi tanggungan penulis.

Penargetan merupakan kunci dalam upaya memperbaiki efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kebutuhan akan penargetan pada hakikatnya muncul dari upaya untuk meminimalkan terjadinya *inclusion error* (orang yang tidak berhak justru menerima bantuan) dan *exclusion error* (orang yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan). *World Bank* (2012) menyebutkan bahwa praktik-praktik penargetan di negara berkembang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yakni (i) sulitnya melakukan identifikasi rumah tangga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan, (ii) mahal biaya operasional, dan (iii) seringnya rumah tangga keluar-masuk garis kemiskinan (*poverty churning*). Pada saat yang sama, penargetan juga dituntut untuk layak dan dapat dimanfaatkan sehingga bisa diterima dan digunakan oleh semua kalangan.

Tabel 1. Preseden Keluar-Masuk Garis Kemiskinan, 2009–2010

		Tahun 2010 (%)				Total
		Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin	
Tahun 2009 (%)	Miskin	44,30	20,21	15,14	20,34	100,00
	Hampir Miskin	21,52	22,66	21,76	34,06	100,00
	Hampir Tidak Miskin	11,54	15,16	23,90	49,41	100,00
	Tidak Miskin	2,94	4,71	9,74	82,61	100,00

Sumber: Sumarto *et al.* (2009).

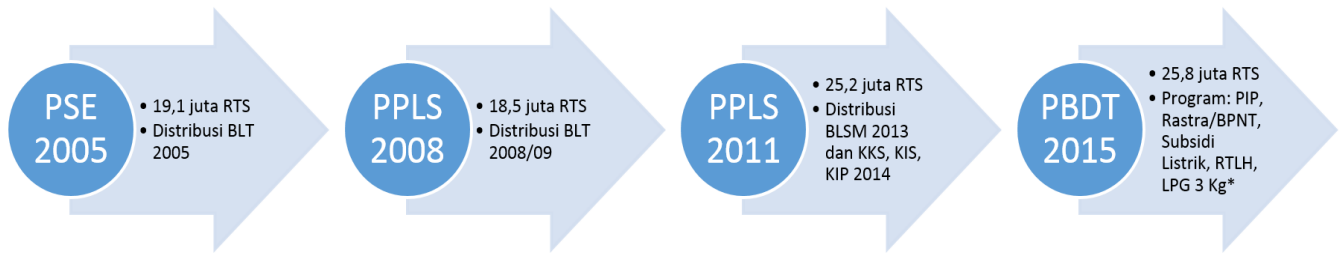
Keterangan: - miskin < GK
 - hampir miskin 1–1,2 GK
 - hampir tidak miskin 1,2–1,5 GK
 - tidak miskin > 1,5 GK

Kebutuhan akan praktik penargetan makin menguat, mengingat penargetan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (Coady *et al.*, 2004). Terlepas dari kenyataan adanya ketidaktepatan penargetan, pemerintah masih memiliki ruang cukup luas untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan sehingga program penanggulangan kemiskinan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rumah tangga yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, adanya satu Basis Data Terpadu (BDT) yang dapat digunakan oleh banyak program diketahui dapat meningkatkan akurasi dan komplementaritas program.

Evolusi Penargetan

Pembangunan BDT merupakan jawaban pemerintah atas tantangan untuk memperbaiki sistem penetapan sasaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Secara umum, BDT merupakan data yang berisikan informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Keberadaan BDT mampu memberikan data tentang sebaran yang mencakup siapa dan di mana (*by name, by address*) maupun agregat dari individu/keluarga/rumah tangga berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi beserta status kesejahteraannya. Tujuan utama BDT bagi program perlindungan sosial adalah untuk melakukan analisis, perencanaan, penetapan sasaran penerima manfaat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran individu/keluarga/rumah tangga.

Pengembangan BDT sebenarnya sudah dimulai sejak pelaksanaan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 yang mendata nama dan alamat rumah tangga miskin. Sebagai sensus kemiskinan pertama di Indonesia, PSE 2005 berisikan sekitar 19,1 juta rumah tangga atau 32% dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia dan digunakan untuk pendistribusian BLT 2005. Selanjutnya, data PSE 2005 dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2008 melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Pemutakhiran ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tiga tahun memungkinkan terjadinya perubahan demografi, sosial, dan ekonomi pada populasi rumah tangga yang datanya telah dikumpulkan melalui PSE 2005. Data PPLS 2008 berisikan sekitar 18,5 juta rumah tangga atau 29% dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia.



Gambar 2. Rekam jejak Basis Data Terpadu

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2016).

Keterangan: * Dalam proses inisiasi dan perencanaan

Seperti halnya pemutakhiran melalui PPLS 2008, tiga tahun kemudian data PPLS 2008 dimutakhirkan melalui kegiatan PPLS 2011. Berbeda dengan pemutakhiran sebelumnya, pada PPLS 2011 inovasi yang dilakukan adalah penggunaan data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebagai *pre-list* atau daftar awal rumah tangga. Pendataan ini mencakup sekitar 45% rumah tangga di Indonesia atau 25,2 juta rumah tangga. Selain inovasi dalam hal *pre-list*, PPLS 2011 menggunakan metodologi pendataan rumah tangga miskin yang lebih baik dengan melibatkan komunitas miskin serta menggunakan lebih banyak variabel untuk memprediksi status kesejahteraan rumah tangga.

Pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga hasil PPLS 2011 dilakukan dengan metode *proxy means testing* (PMT). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama BPS mengembangkan model PMT yang spesifik untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan karakteristik kesejahteraan di masing-masing wilayah. Data PPLS 2011 yang sudah diolah tersebut kemudian dikelola oleh TNP2K sebagai BDT, dan titik ini dianggap sebagai periode resmi lahirnya BDT sebagai basis penetapan sasaran program perlindungan sosial.

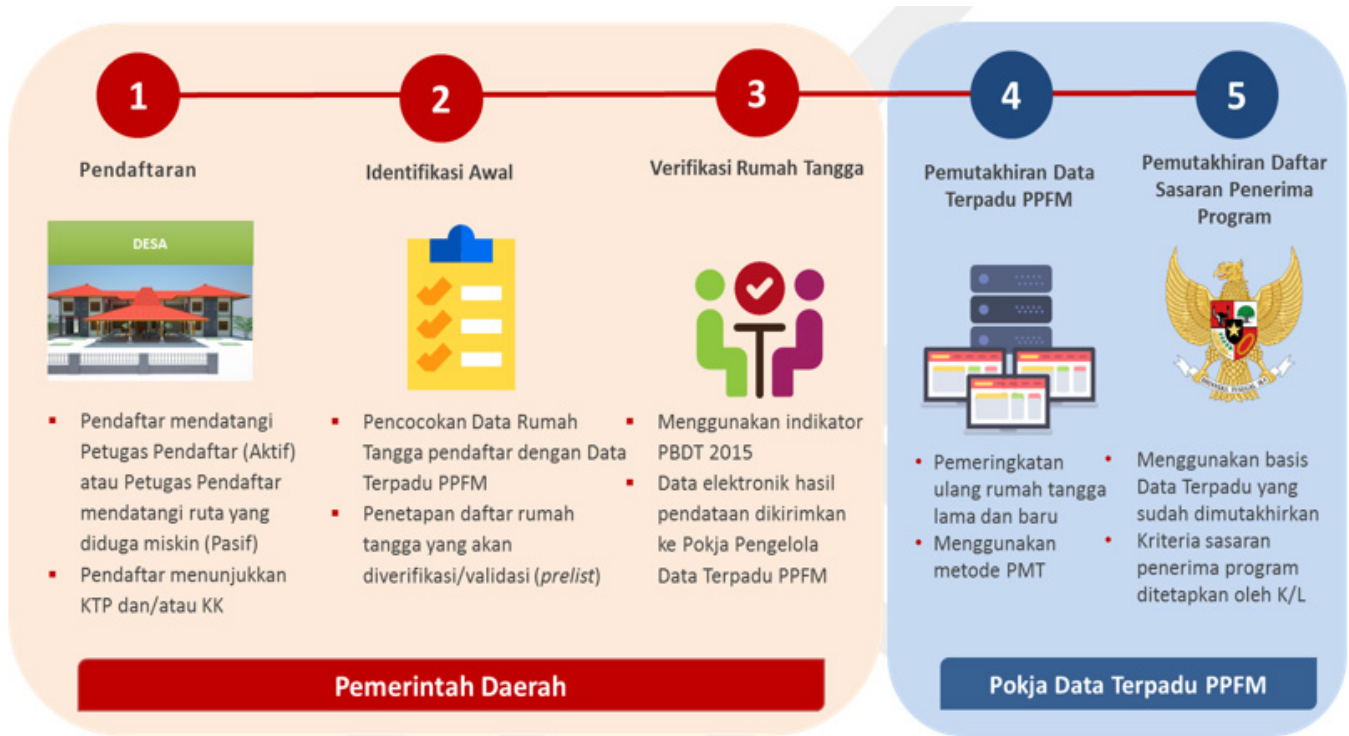
Pada 2015, pemerintah kembali berinisiatif memutakhirkan BDT sekaligus menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam kegiatan pendataan sebelumnya. Kegiatan ini selanjutnya disebut Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Pemutakhiran dilakukan melalui kegiatan validasi data rumah tangga yang terdaftar dalam BDT dan data hasil pemutakhiran kepesertaan program. Inovasi penting dalam pemutakhiran ini adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan instrumen penting untuk menjangkau rumah tangga miskin yang selama ini belum menjadi bagian dari BDT. Cakupan data yang dimiliki PBDT 2015 adalah 25,8 juta rumah tangga. Seiring diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32/HUK/2016 pada April 2016, data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga miskin hasil PBDT 2015 secara resmi ditetapkan sebagai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM).

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri

Kajian TNP2K tentang implementasi penargetan program perlindungan sosial dengan menggunakan BDT di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan *on demand* menawarkan sarana bagi rumah tangga, keluarga, dan masyarakat untuk menyuarakan permintaan bantuan dan kebutuhan mereka (Bah *et al.*, 2015). Hal ini juga didukung oleh hasil kajian World Bank (2012) yang menunjukkan bahwa model *selftargeting* di level desa (komunitas) yang dikombinasikan dengan sistem pemeringkatan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk terpilih menjadi calon penerima bantuan program.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, pemerintah Indonesia mengembangkan Mekanisme Pendaftaran Mandiri (MPM) untuk memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri secara aktif (*on-demand application*), diverifikasi secara objektif, serta dimasukkan ke dalam bagian “yang belum terdaftar” pada Data Terpadu PPFM. Melalui pelaksanaan MPM, pemutakhiran Data Terpadu PPFM dapat dilakukan secara lebih dinamis dan galat eksklusi (*exclusion errors*) dalam penargetan program perlindungan sosial dapat diminimalkan.

Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan melalui MPM selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Sosial dan dinyatakan dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah sebagai dasar untuk melaksanakan program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan. K/L dan pemerintah daerah selaku penyelenggara program menetapkan kriteria sasaran penerima program. Berdasarkan kriteria tersebut, akan diterbitkan daftar sasaran penerima program dari Data Terpadu PPFM yang termutakhirkan untuk ditetapkan



Gambar 3. Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Sumber: Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (2016).

sebagai penerima program oleh K/L atau pemerintah daerah penyelenggara program perlindungan sosial/ penanggulangan kemiskinan.

Berbagai pengalaman internasional yang telah menerapkan pendekatan *on demand* dalam pelaksanaan pemutakhiran data sasaran program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan menunjukkan perlunya pembagian tugas dan kewenangan (kelembagaan) antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Selain menjaga objektivitas data, hal ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan besar kepada pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran, mengingat keberadaan masyarakat yang lebih dekat dengan pemerintah daerah. Tercatat bahwa setidaknya, praktik sistem *On-demand Application* telah dilakukan di Brazil (Cadastro Unico), Kolombia (Sisben), dan Filipina (Sistahanan).

Tabel 2. Pelaksanaan Sistem On Demand di Berbagai Negara

NEGARA	Pelaksana di Tingkat Pusat		Pelaksana di Tingkat Daerah	
	Lembaga	Fungsi	Lembaga	Fungsi
Brazil - Cadastro Único (CU)	Kementerian Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kelaparan (MDS)	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan, aturan dan prosedur Melakukan analisis data dan pengesahan hasil 	Sekretariat Bantuan Sosial (<i>Social Assistance Secretariat</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Operasional layanan Koordinasi kegiatan pendaftaran dan pendataan
Kolombia - Sisben	Badan Perencanaan Nasional (National Planning Agency/DNP)	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pemanfaatan data untuk program-program nasional 	Perwakilan DNP di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi data ke tingkat pusat Fasilitasi pemanfaatan data untuk program-program daerah.
Filipina - Sistahanan	Departemen Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial (DSWD)		Unit Penargetan Rumah Tangga Nasional (NHTU) di bawah Kanwil DSWD	

Sumber: Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (2016).

Kesimpulan

Pembangunan dan pengembangan BDT merupakan kunci untuk menuju pendekatan terpadu dalam menentukan penerima manfaat program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sistem bantuan dan perlindungan sosial yang berfokus pada rumah tangga dan individu yang lebih tepat sasaran diyakini akan lebih efektif mengurangi angka kemiskinan melalui upaya meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Dinamika kemiskinan di Indonesia perlu memperoleh perhatian agar target pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri merupakan instrumen bagi pemerintah untuk menjawab kebutuhan akan perlunya suatu metode pemutakhiran yang lebih dinamis. Selain itu, MPM juga merupakan upaya pemerintah untuk menjangkau rumah tangga miskin dan rentan yang belum tercakup dalam basis data sebelumnya sekaligus meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran.

Daftar Pustaka

- Bah, Adama, Samuel Bazzi, Sudarno Sumarto & Julia Tobias 'Finding the Poor vs. Measuring their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia,' TNP2K Working Paper 2014.
- Bah, Adama., Nazara, Suahasil. & Satriawan, Elan. (2015). *Basis Data Terpadu di Indonesia untuk Program Perlindungan Sosial. IPC-TNP2K Research Brief No.49, Juli 2015.*
- Brunori, P. & O'Reilly, M. (2010). *Social Protection for Development: a Review of Definitions. Munich Personal RePEc Archive Paper, 29495.*
- Coady, D., Grosh, M. & Hoddinott, J. (2004). *Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience. Washington DC: World Bank.*
- Frankenberg, E., Thomas, D. & Beegle, K. (1999). *The Real Cost of Indonesia's Economic Crisis: Preliminary Findings from the Indonesia Family Life Surveys. RAND Working Paper, DRU-2064-NIA/NICHD.*
- Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. (2016). *Pedoman Umum Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Jakarta: Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.*
- Levinsohn, J., Berry, S. & Friedman, J. (1999). *Impacts of the Indonesia Economic Crisis: Price Changes and the Poor. NBER Working Paper, 7194.*
- Manning, C. (2000). *Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: Context, Trends and Implications. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 36, 105-136.*
- Sumarto, Sudarno, Wenefrida Widyanti, Asep Suryahadi, and Athia Yumna (2009) 'The Relationship between Chronic Poverty and Household Dynamics: Evidence from Indonesia', SMERU Working Paper, The SMERU Research Institute, Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2016). *Pengembangan dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu. TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Februari 2016.*
- World Bank. (2012). *Targeting the Poor and Vulnerable in Indonesia. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.*

Peningkatan Kualitas Data dan Governansi Kebijakan Pembangunan Pusat-Daerah Lombok, 17-18 Mei 2017

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tercermin dalam 20 (dua puluh) prioritas pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidakesetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia sejak tahun 2000 menerapkan kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam rangka mencapai target-target SDGs, tentu diperlukan harmonisasi antara pusat dan daerah, yang diawali dengan persepsi yang sama akan pentingnya kualitas data baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum Masyarakat Statistik (FMS), memiliki kepedulian untuk berkontribusi pada penyelesaian tantangan dan masalah kualitas data sebagai landasan kebijakan program-program pembangunan, sebab dari data yang berkualitas lahirlah program-program yang tepat sasaran. Untuk itu, FMS berinisiatif untuk melaksanakan Lokakarya dengan tema, "Peningkatan Kualitas Data dan Governansi Kebijakan Pembangunan Pusat-Daerah", yang dilaksanakan di Lombok pada 17-18 Mei 2017. Acara yang dihadiri kurang lebih 100 (seratus) peserta dari berbagai kalangan ini, diharapkan mampu menyebarkan hasil kerja FMS kepada masyarakat, serta meningkatnya pemahaman akan pentingnya data berkualitas bagi pembangunan. Lokakarya dengan format diskusi ini dipandu oleh Prof. Dr. D. S. Priyarsono dengan menghadirkan beberapa narasumber.

Bertindak sebagai pembicara pertama, yaitu Dr. Rosiyadi Sayuti (Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat), yang menyampaikan pidato "Perbaikan Data untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat". Rosiyadi menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah dan civitas akademika harus mengalami perbaikan, dimana harus ada sentuhan porsi akademik dalam perencanaan daerah. Rosiyadi menyadari bahwa data merupakan landasan dari keberhasilan pembangunan, oleh sebab itu saat ini sedang dirintis NTB SATU PETA dengan melibatkan banyak *stakeholder*. Diakhir pidatonya, Rosiyadi menyampaikan harapannya bahwa hubungan antara statistisi dan masyarakat perlu ditingkatkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang awam terhadap statistik. Harapannya adalah masyarakat dapat mengakui kehebatan statistik saat tepat memprediksi

berbagai parameter, tidak hanya di bidang politik tapi juga di bidang-bidang lainnya. Untuk itu perlu diformulasikan secara sederhana indeks-indeks dan indikator statistik. Ini penting, sebab dengan pemahaman yang baik maka masyarakat tidak hanya melihat ranking capaian suatu daerah, tapi juga makna dibalik angka, sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa yang harus dikerjakan dan dampaknya kedepan bisa menjadi lebih baik.



Selanjutnya, pembicara kedua yaitu Dr. Iskandar Simorangkir (Deputi Menko Bidang Perekonomian) menyampaikan materi dengan tema “Governansi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah”. Iskandar menyampaikan bahwa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah telah dengan tegas diatur oleh undang-undang, dan dukungan pemerintah pusat kepada daerah tergambar dari meningkatnya dana transfer pusat ke daerah secara signifikan dari tahun ke tahun. Iskandar mengakui masih ada permasalahan dan tantangan antara lain efektivitas implementasi pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah, koordinasi pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah, sinkronisasi rencana pembangunan, dan duplikasi/tumpang tindih perencanaan antara pusat dan daerah. Permasalahan ini yang sangat mendesak untuk diselesaikan, selain permasalahan makro ekonomi Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil mengurangi pengangguran dan kemiskinan, namun diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Artinya, otonomi daerah tidak memperbaiki ketimpangan antara kaya dan miskin. Iskandar menyebutkan bahwa sumber ketimpangan antara lain: ketimpangan penguasaan tanah, akumulasi penguasaan lahan yang tidak dimanfaatkan dan harga tidak terjangkau, tenaga kerja kurang kompeten, kewirausahaan lemah, perbedaan kesempatan pendidikan dan modal, birokrasi hanya sebagai proyek dan kurang peka terhadap ketimpangan. Untuk itu, arah kebijakan ke depan harus sinkron antara kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Data harus valid, dan ini harus didukung penuh oleh pemerintah daerah.

Pembicara berikutnya, Dr. Sudarno Sumarto (Pendiri *SMERU Research Institute*) menyampaikan materi “Tantangan dan Potensi Penyempurnaan Indikator Sosial Ekonomi: Pelibatan Pemerintah Daerah”. Sudarno menyatakan bahwa di era media sosial saat ini, data berkualitas menjadi sangat penting dan relevan. Tapi hal ini tidak semudah membalik telapak tangan, BPS juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi antara BPS dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Pemerintah Daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting. Pemerintah perlu mengetahui dimensi data berkualitas yaitu: relevan, akurat, terjadwal, tepat waktu, aksesibel, terklarifikasi, terbandingkan, dan koheren. Bukan hal yang mudah, sebab tantangan terbesar data berkualitas adalah metodologi, *non sampling error*, dan ketersediaan data hingga tingkat daerah. Namun begitu Sudarno optimis sebab berbagai potensi dimiliki oleh pusat dan daerah antara lain: kemajuan teknologi, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan *interoperability*. Sudarno mencontohkan sejarah kerjasama TNP2K dan BPS yang dimulai dari PSE 2005 hingga PBDT 2015 yang telah diperbaharui yg sekarang dikelola oleh Kemensos. Data di Indonesia saat ini telah maju, dimana data bukan lagi dominasi ahlinya saja (BPS) tapi sudah ada FKP (forum komunikasi publik). Ke depan perlu dipikirkan mekanisme pemutakhiran mandiri, dimana menjadi tugas daerah untuk meng-*update* data yang ada, karena akan sangat berat bila BPS melakukan *updating* sendiri.

Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin, berkesempatan untuk menjadi *Keynote Speaker*. Dalam *keynote speech*-nya, Muhammad Amin menyampaikan bahwa pertemuan ini penting dalam memberikan masukan bagi penyusunan data untuk kebijakan daerah, sebab kesinambungan pembangunan akan tercapai bila data tersedia. Harmonisasi data dan kebijakan berujung pada regulasi, sebab di era otonomi daerah diberikan ruang berkeaktivitas. Untuk itu, terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus didukung oleh regulasi, termasuk sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Muhammad Amin memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjadikan NTB sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata dan juga sebagai penyangga pertanian nasional. Bekerjasama dengan BPS Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB merintis program Satu Data yang menjadi landasan pengambilan berbagai kebijakan strategis ke depannya.

Di akhir acara, Prof. Dr. D. S. Priyarsono menyampaikan rumusan Lokakarya sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemerataan membutuhkan informasi yang berlandaskan sistem perstatistikan nasional yang kokoh dan dapat diandalkan.
2. Untuk memperkuat SSN, pemerintah perlu meningkatkan sistem basis data yang terintegrasi yang dapat diakses oleh pengambil kepentingan khusus Pemda.
3. Sehubungan dengan hal itu, kerjasama antara Pemda dan BPS dalam penyediaan data yang dapat digunakan untuk pembangunan perlu ditingkatkan.
4. Upaya kerjasama tersebut secara konkret telah dilakukan Pemprov NTB dalam prakarsa NTB Satu Data, Pemerintah NTB dan BPS membentuk forum data dan prakarsa NTB Satu Peta.
5. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai jika ada komunikasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

Program Kerja FMS 2017-2018

- Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data
- Meningkatkan *coverage* melalui partisipasi responden (khususnya data perusahaan/*establishment*).
- Mediator dalam mengkomunikasikan data
- Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional dan daerah (Musrenbangnas dan Musrenbangda)
- Pembentukan kelompok kerja (pokja)

Pengurus dan Anggota FMS 2017-2018

Pengarah:

Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri PPN/
Kepala Bappenas)

Pengurus:

1. Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua)
2. Dr. Ir. Leonard V. H. Tampubolon, MA (Wakil Ketua I)
3. Prof. Mohamad Ikhsan, MA, Ph.D (Wakil Ketua II)
4. Dr. Adi Lumaksono, MA (Sekretaris)

Anggota :

1. Prof. Dr. Adrianus Mooy
2. Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA
3. Ir. Bambang Prijambodo, MA
4. Prof. Dr. Dradjad Irianto
5. Hendy Sulistiowati, SE, MAE
6. Prof. Dr. Insukindro
7. Prof. Dr. D. S. Priyarsono, MS
8. Eko Putro Adijayanto
9. Dr. Iskandar Simorangkir
10. Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc
11. Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anwar
12. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi
13. Dra. Rahma Iryanti, MT
14. Dr. Slamet Sutomo
15. Dr. Sonny Harry B. Harmadi
16. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D
17. Sri Soelistyowati, MA
18. Prof. Suahasil Nazara, SE, M.Sc, Ph.D
19. Dr. Sudarno Sumarto
20. Dr. Udjianna Sekteria Pasaribu
21. Dr. Yati Kurniati, SE, MA

Buletin Ringkas Statistical & Policy Brief

Diterbitkan oleh:
Forum Masyarakat Statistik



Forum Masyarakat Statistik

Sekretariat: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas
Jln. Taman Suropati No. 2
Gedung Madiun Lantai 5
Jakarta 10310
Telp (+62 21) 31936207,
Fax 3145374
Email : sekretariatfmsnesia@gmail.com
Web: <http://www.fms.or.id>